

Pelunasan Biaya Haji Sudah Bisa Diangsur

JAKARTA (KR) - Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M rata-rata sebesar Rp 93,4 Juta. Sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp 56,04 Juta.

Selanjutnya, hasil kesepakatan ini sedang diusulkan ke pemerintah untuk diterbitkan Keputusan Presiden. Jubir Kemenag Anna Hasbie mengatakan, BPIH disepakati dalam Raker Komisi VIII DPR dan Kemenag pada 27 November 2023.

Selain terkait BPIH, dalam salah satu kesimpulan rapat itu disebutkan, Komisi VIII DPR RI meminta Kemenag bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH untuk memberlakukan kebijakan cicilan pelunasan biaya haji bagi jemaah 1445 H/2024 M.

"Dalam kesimpulan rapat disebutkan, proses mencicil biaya pelunasan bisa dilakukan sejak diputuskannya hingga akhir pelunasan BPIH," sebut Anna Hasbie di Jakarta, Rabu (13/12).

Sebagai tindaklanjut, kata Anna Hasbie, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mengirim surat kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia pada 4 Desember. Tujuannya, menginformasikan, jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota haji 1445 H/2024 M sudah dapat mencicil pelunasan biaya haji.

"Kita sudah meminta

para Kepala Kanwil Kemenag untuk menyosialisasikan, jemaah haji reguler dapat melakukan pelunasan Bipih secara bertahap melalui rekening masing-masing," tegas Anna Hasbie

Skema ini, katanya, baru diberlakukan sekarang. Selama ini, proses pelunasan biaya haji tidak dicicil. Pembayaranannya baru bisa dilakukan setelah terbitnya Keppres tentang BPIH.

"Mulai sekarang, kebijakan mencicil pelunasan biaya haji diterapkan. Tujuannya untuk memudahkan jemaah. Silakan ini untuk dimanfaatkan," pesan Anna.

Kuota haji Indonesia 1445 H/2024 M sebanyak 221.000, terdiri 203.400 jemaah haji reguler dan 17.600 jemaah haji khusus. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia mendapat kuota tambahan sebesar 20.000 dari Arab Saudi. (Ati)-f

TERKAIT SUAP PENGURUSAN PERKARA DI MA Nurdin Halid Diperiksa KPK

JAKARTA (KR) - Pengusaha sekaligus politikus Partai Golkar Nurdin Halid, Rabu (13/12) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurdin Halid diperiksa terkait dugaan gratifikasi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung oleh tersangka mantan Hakim Agung Gazalba Saleh (GS).

"Saksi Nurdin Halid hadir dan didalam pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya akses pengurusan perkara melalui jalur tersangka GS," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/12).

Namun Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan terhadap Nurdin Halid. KPK pada Kamis (30/11) kembali menahan mantan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Repu-

blik Indonesia Gazalba Saleh (GS) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan TPPU terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

"Terkait kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka GS untuk 20 hari pertama, mulai 30 November sampai dengan 19 Desember 2023 di Rutan KPK," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan.

Asep mengatakan Gazalba Saleh diduga telah memanfaatkan jabatannya selaku Hakim Agung Kamar Pidana MA RI sejak 2017 untuk mengondisikan isi amar putusan yang mengakomodasi dan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berperkara dan mengajukan upaya hukum di MA. (Ful)-f

TEGASKAN PENETAPAN TERSANGKA SESUAI SOP Polisi Tolak Replik Firli Bahuri

JAKARTA (KR) - Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya menegaskan, penetapan tersangka kepada Ketua non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sudah sesuai peraturan yang ada. Oleh karena itu, pihaknya menolak replik yang diajukan oleh Firli Bahuri melalui tim kuasa hukumnya dalam sidang itu.

"Jelas semua sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), semua aturan yang berlaku, 'lex specialis' tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah kami lakukan," kata Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Putu Putera Sadana saat jeda sidang Praperadilan Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (13/12).

Putu mengatakan, Polda Metro Jaya juga telah memiliki alat bukti sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 2.

"Dalam Perma, minimal dua alat bukti, sementara kita memiliki empat alat bukti," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam sidang yang beragendakan pembacaan duplik, pihaknya kembali meminta hakim menolak praperadilan yang diajukan Firli Bahuri untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri berdasarkan surat ketetapan nomor S.Tap/325/XI/RES.3.3/Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023 adalah sah.

Pada sidang sebelumnya, Selasa (12/12), Bidkum Polda Metro Jaya yang mewakili Kapolda Metro Jaya sebagai termohon dalam sidang praperadilan gugatan Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memperlihatkan sejumlah dokumen yang disita terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. (Ant/Has)-d



KR-Antara/Harviyan Perdana Putra

STOK BERAS BULOG: Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi (kedua kanan) didampingi Direktur SCPP Perum Bulog Mokhammad Suyanto (kedua kiri), dan Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Akhmad Kholisun (tengah) mengecek beras di Gudang Bulog Bondasari, Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023). Direktur Human Capital Perum Bulog menyatakan stok beras saat ini mencapai 1,5 juta ton dengan ketersediaan beras di Gudang Bulog Bondasari sebanyak 2.248.750 kilogram.

REKTOR UPY KUKUHKAN 2 GURU BESAR

Pentingnya Pembelajaran Inovatif dan Pendidikan Karakter

BANTUL (KR) - Rektor Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Dr Ir Paiman MP mengukuhkan 2 guru besar di Auditorium UPY, Sonosewu Bantul, Rabu (13/12). Kedua Guru Besar itu Prof Dr Sunarti MPd (Bidang Pendidikan Bahasa Indonesia - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/FKIP UPY) dan Prof Dr Sukadari SE SH MM (Bidang Ilmu Pendidikan FKIP - UPY). Ahmad Riyadi MKom selaku Ketua Senat UPY memimpin langsung Sidang Terbuka Pengukuhan Guru Besar. Sidang Terbuka Senat UPY dihadiri rektor beserta jajarannya serta Armansyah Prasakti SH MH (Ketua Pembina YP UPY), Drs John Sabari MSI (Ketua Pengurus YP UPY) dan memberi sambutan Taufiqurrahman SE (Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Dikti/LLDikti Wilayah V Yogyakarta).

Prosesi pengukuhan diawali pembacaan Surat Keputusan (SK) Mendikbud Ristekdikti RI oleh Dr Niken Wahyu Utami (Wakil Dekan II FKIP-UPY), pemutaran video profil Prof Dr Sunarti MPd dan Prof Dr Sukadari SE SH MM. Prof Sunarti menyampaikan pidato pengukuhan berjudul 'Optimalisasi Kemampuan Literasi Membaca Anak Sekolah Dasar melalui Pembelajaran Inovatif'. Prof Sukadari menyampaikan pidato pengukuhan berjudul 'Pendidikan Karakter melalui Budaya Membentuk Insan Beradab'. Pengukuhan Guru Besar dilakukan oleh Rektor UPY Dr Paiman MP didampingi Drs John Sabari MSI dilanjutkan pengalungan samir oleh Rektor dan penyerahan plakat Guru Besar oleh Drs John Sabari MSI kepada Prof Sunarti MPd dan Prof Dr Sukadari MM.

Dr Ir Paiman MP selaku Rektor UPY menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas semua dukungan sehingga UPY memiliki 2 Guru Besar. "Kami yakin, UPY memiliki potensi yang besar sehingga doktor-doktor muda bisa mengejar beliau berdua jadi Guru Besar," tuturnya.

Mencapai tataran Guru Besar tidak hanya menjadi capaian pribadi, tetapi juga capaian fakultas dan universitas. Bertambahnya Guru Besar akan semakin diakui eksistensi bidang akademik keilmuan



KR-Jayadi Kastari

Dari kiri - kanan, Dr Ir Paiman MP (Rektor UPY), Drs Kadamanta Baskara Aji Ketua PGRI DIY), Prof Dr Sukadari MM, Prof Dr Sunarti MPd, Drs John Sabari MSI (Ketua Pengurus YP UPY), Armansyah Prasakti SH MH (Ketua Pembina YP UPY), berfoto bersama usai pengukuhan.

yang digelar. "Kami berharap UPY semakin apik dan unggul," harapnya.

Harapan senada juga disampaikan Drs John Sabari MSI, Yayasan Pembina UPY sangat mengapresiasi pengukuhan Guru Besar ini. "Kami sangat mengapresiasi kerja keras Rektor UPY dan jajarannya sehingga UPY mampu melahirkan Guru Besar. Kami dari yayasan mendorong terus dilakukan percepatan pencapaian Guru Besar. Kami mendorong doktor-doktor muda untuk mengikuti jejak beliau berdua," tandasnya.

Ditambahkan Dr Sigit Handoko SH MH, Kepala Humas dan Protokol UPY, pengukuhan Guru Besar Prof Dr Sunarti MPd merupakan Guru Besar kedua, Prof Dr Sukadari SE SH MM Guru Besar ketiga. "Ini pengukuhan Guru Besar kedua dan ketiga yang dilahirkan UPY. Guru Besar pertama, almarhum Prof Dr Buchory MS MPd," tuturnya.

Sedangkan Prof Sunarti dalam pidato berjudul 'Optimalisasi Kemampuan Literasi Membaca Anak SD melalui Pembelajaran Inovatif' menyebutkan, melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru berperan mengembangkan keterampilan membaca siswa. "Kemampuan membaca, seperti juga halnya dengan kemampuan berbahasa yang lain, dapat dimiliki melalui bimbingan dan latihan yang intensif. Latihan



KR - Jayadi Kastari

Rektor UPY Dr Paiman MP mengalungkan samir dan Drs John Sabari MSI menyerahkan plakat Guru Besar kepada Prof Dr Sunarti MPd serta Prof Dr Sukadari MM.

DIRANCANG SEBAGAI PANDUAN ETIKA

Kemenkominfo Atur Penggunaan AI

JAKARTA (KR) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, Kemenkominfo segera menerbitkan peraturan tertulis yang ditujukan khusus untuk penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia.

"Kita sedang membuat Peraturan Menteri (Permen), namun bisa nanti jadinya Surat Edaran, bisa juga permanen, nanti kita lihat kebutuhannya, paling tidak sebagai pengantar, itu secepatnya (diluncurkan)," kata Menkominfo di Jakarta, Rabu (13/12).

Nilai-nilai peraturan mengenai AI itu, lanjut Budi Arie, akan diadopsi dari peraturan serupa yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa belum lama ini. Adapun Undang Undang AI tersebut mengambil pendekatan berbasis risiko terhadap produk atau layanan yang menggunakan kecerdasan buatan dan berfokus pada mengatur penggunaan AI dibanding-

kan mengatur teknologinya sendiri.

UU itu dibuat untuk melindungi demokrasi, aturan hukum dan hak fundamental seperti kebebasan berpendapat, dan di saat yang sama juga mendorong adanya investasi dan inovasi. "Di Eropa sudah mulai muncul, nah kita pelajari bagaimana nanti implementasinya di Indonesia. Karena nilai-nilainya sudah kelihatan, begitu juga tentang pemanfaatan, dan kontrolnya, kita mengadopsi apa yang udah diputuskan negara maju," ujar Budi Arie.

Meski begitu, Menkominfo mengatakan, peraturan mengenai AI ini bukan berarti Pemerintah menolak kemajuan teknologi, melainkan untuk mengatasi potensi dampak negatif yang bisa muncul dari teknologi tersebut. "Semangatnya itu bukan kita menolak kemajuan teknologi, tapi kita harus tata, kita harus atur bagaimana dampak negatifnya bisa kita minimalisasi," tambahnya.

Direktur Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan, Pemerintah betul-betul memperhatikan pengembangan AI agar jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang buruk, namun tidak kemudian menghentikan perkembangannya. "Kita perlu kritis terhadap pengembangan teknologi, tetapi jangan terlalu khawatir. Khawatir seperlunya saja. Teknologi harus dikembangkan supaya dampak baiknya ditingkatkan, dan dampak buruknya diminimalisasi," katanya.

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyatakan, Surat Edaran (SE) AI yang saat ini sudah memasuki tahap finalisasi, dirancang sebagai panduan etika bagi para pelaku industri yang menggunakan AI. "SE ini merupakan panduan etik. Kami harapkan dia jadi rujukan nilai dalam memproduksi produk-produk AI bagi para pelaku usaha dan industri yang menerapkan atau memanfaatkan AI," katanya. (Ant/San)-f

Penyaluran BLT El Nino, Dorong Daya Beli Masyarakat

PEKALONGAN (KR)

- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Pekalongan, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (13/12).

Presiden Jokowi melalui Sekretaris Presiden menyebut, BLT El Nino tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan oleh kekerasan. "Karena panasnya panjang sehingga harga kebutuhan pokok ada yang naik, utamanya beras itu ditutup dengan ini," katanya.

Presiden juga menekankan agar bantuan tersebut dapat diman-

faatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan gizi. "Mau dipakai untuk apa? Yang paling penting untuk gizi anak, gizi keluarga," ucapnya saat berdialog dengan para penerima manfaat.

Selain itu, Kepala Negara juga memastikan bahwa penerima manfaat yang hadir saat itu juga merupakan penerima Bantuan Pangan Cerdasan Beras Pemerintah (CBP) yang penyalurannya sudah dimulai sejak bulan September 2023.

"Ini juga penerima beras? 10 kilogram setiap bulan? Yang Desember sudah diterima? Berarti September, Oktober, November, ditambah Desember empat kali sudah?" tanya Presiden. "Sudah," jawab para pene-

rima manfaat.

Presiden pun menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tersebut akan dilanjutkan oleh Pemerintah pada tahun 2024 tepatnya untuk bulan Januari, Februari, Maret. Selain itu, Presiden menyebut bantuan serupa juga akan ditambah untuk periode bulan selanjutnya. "Nah nanti kalau anggaran APBN itu masih ada, ditambah lagi April, Mei, Juni," katanya.

Turut mendampingi Presiden, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid. (Ant)-f